



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Pariwisata RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 26 Mei 2016.
Pukul	: 14.00 s.d. selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK RI Tahun 2015 2. Penyampaian Laporan Hasil Kunker Komisi X DPR RI Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 3. Lain-Lain
Hadir	: 31 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pariwisata RI beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.15 WIB oleh Ferdiansyah S.E., M.M/Wakil Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) BPK RI Tahun 2015.

- a. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata RI atas penurunan rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut untuk laporan keuangan tahun 2012 sd 2014, dengan perkembangan penyelesaian rekomendasi dari BPK RI adalah sbb:

Tahun Rekomendasi	Nilai Rekomendasi	Terselesaikan	Dalam Proses Penyelesaian
2012	Rp37.459.835.061	Rp9.340.161.200,-	Rp28.119.673.860,-
2013	Rp41.703.417.385,-	Rp22.422.826.842,-	Rp19.280.590.542,-
2014	Rp17.232.424.023,-	Rp7.736.142.652,-	Rp9.496.281.370,-
2015	Rp13.823.171.142,-	Rp7.431.942.854,-	Rp6.391.228.288,-
	US\$4.899,80	US\$4.899,80	US\$0

- b. Komisi X DPR RI menyambut baik kepada Kementerian Pariwisata RI yang telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), dan rencana aksi guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK RI terhadap laporan keuangan tahun 2012-2015.
 - c. Kementerian Pariwisata RI menargetkan opini BPK RI tahun 2016 sd 2018 minimal WDP, dan pada tahun tahun 2019 WTP. Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pariwisata RI untuk membuat peta jalan (*road map*) untuk mencapai target yang dimaksud.
- 2. Laporan Hasil Kunker Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 ke Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan**
- a. Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pariwisata RI agar mengklasifikasikan permasalahan yang sudah terselesaikan dan yang akan diselesaikan.
 - b. Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pariwisata RI agar pada saat Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan kerja yang akan datang ada perkembangan penyelesaian permasalahan yang diselesaikan.
- 3. Lain-lain**
- a. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi Kementerian Pariwisata RI atas peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 109,07% dari target per Maret 2016 (*year on year*), dan apresiasi atas keberhasilan Kementerian Pariwisata RI memperoleh 16 penghargaan dari dunia Internasional dan Nasional selama kurun waktu Januari s/d Mei 2016.
 - b. Dalam rangka pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata, Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pariwisata RI agar:
 - i. Regulasi / kebijakan kepariwisataan memberdayakan masyarakat;
 - ii. Kementerian Pariwisata RI menjadi penanggungjawab (*leading sector*) setiap pelaksanaan kegiatan;
 - iii. Meningkatkan kualitas SDM, dan menyiapkan SDM tidak terbatas hanya di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP), tetapi dapat bekerja sama dengan beberapa PTN dan/atau PTS;
 - iv. Meningkatkan sadar wisata kepada destinasi baru;
 - v. Penyediaan infrastruktur yang memadai termasuk pula sarana dan prasarana pendukungnya;
 - vi. Kenyamanan dan keamanan untuk para wisatawan terjamin;

- vii. Memfasilitasi proses sertifikasi profesi;
 - viii. Evaluasi terhadap penyelenggara kegiatan kepariwisataan untuk memperoleh hasil (*out put*) yang maksimal.
- c. Dalam rangka persiapan pembahasan RAPBN tahun 2017, Komisi X DPR RI memberikan beberapa catatan antara lain:
- i. Meminta Kementerian Pariwisata RI untuk menyampaikan kegiatan prioritas pariwisata dan jadwalnya di masing-masing provinsi.
 - ii. Peningkatan anggaran untuk SDM, kelembagaan, sadar wisata, dan destinasi pariwisata.
 - iii. Kegiatan promosi pemasaran pariwisata tidak terpusat di Jakarta.
 - iv. Penyampaian data yang membuktikan efektifitas promosi pemasaran pariwisata melalui digitalisasi.
- d. Kementerian Pariwisata RI akan menjawab seluruh pertanyaan dari Anggota Komisi X DPR RI secara tertulis dan akan disampaikan kepada Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 6 Juni 2016.

III. PENUTUP

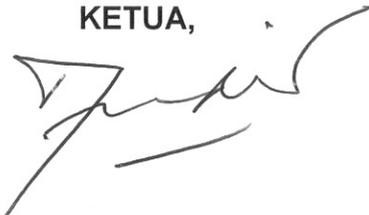
Rapat ditutup pada pukul 18.00 WIB

MENTERI PARIWISATA RI,



ARIEF YAHYA

KETUA,



FERDIANSYAH, S.E., M.M